

**REVIU**

**2020**

**2024**

**RENCANA  
STRATEGIS**

**DIREKTORAT STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**REVIU**

2020

2024

---

**RENCANA  
STRATEGIS**

---

**DIREKTORAT STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 2020-2024

**No. Publikasi** : 4310.2001  
**Katalog BPS** : 1201038  
**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25.7 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 58

**Naskah:**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

**Gambar Kulit:**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pusat Statistik - Indonesia

# Kata Pengantar

---

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan penjabaran dari Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial periode Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik ketahanan sosial.

Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ini disusun sekaligus untuk mengakomodir dan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Hal ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ini disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (Statcap-Cerdas).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial **“Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”**. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 14 Januari 2022  
Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Harmawanti Marhaeni



# Ringkasan Eksekutif

---

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik ketahanan sosial yang meliputi Ketahanan Wilayah, Lingkungan Hidup, Politik dan Keamanan, serta Kerawanan Sosial. Dalam melaksanakan kegiatannya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melakukan pengumpulan data berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Deputi Statistik Sosial yaitu sebagai “**Penyedia Data Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju**” Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dituntut untuk menyediakan data statistik Ketahanan Wilayah, Lingkungan Hidup, Politik dan Keamanan, serta Kerawanan Sosial yang terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah Rencana Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi tersebut diperlukan panduan tugas pokok dan fungsi kebijakan dan strategi yang tepat.

Penjabaran tujuan pada Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menjadi sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, melalui sasaran strategis : meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas.
2. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional, melalui sasaran strategis: penguatan statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Ketahanan Sosial.

Seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024 ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk mewujudkan visi “ **Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju**”.



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Kondisi Umum .....	4
1.2.1. Pencapaian Umum Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2017-2019 .....	4
1.2.2. Aspirasi Masyarakat.....	7
1.2.3. Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2015-2019.....	8
1.3. Potensi dan Permasalahan .....	11
1.3.1. Potensi yang Dimiliki .....	11
1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi .....	12
<b>BAB II – VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL</b>	
2.1. Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial .....	17
2.2. Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.....	17
2.3. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.....	18
2.4. Sasaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial .....	19
<b>BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN REGULASI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial .....	23
3.1.1. Arah dan Kebijakan Strategi .....	23
3.1.2. Program dan Kegiatan .....	28
3.1.3. Prioritas Nasional.....	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial .....	30
3.2.1. Arah dan kebijakan Strategi.....	30
3.2.2. Program dan Kegiatan .....	32
3.2.3. Prioritas Nasional.....	32
3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial .....	33

**BAB IV – TARGET KINERJA DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL**

4.1. Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial .....	39
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	39
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan .....	41
4.2. Kerangka Pendanaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.....	41

**BAB V – PENUTUP**

5.1. Penutup .....	45
--------------------	----

**LAMPIRAN**

Lampiran .....	49
----------------	----

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Statistik Ketahanan Sosial Terhadap Target Renstra, Menurut Sasaran/Tujuan dan Indikator Kinerja, 2017-2019 .....	5
Tabel 2.1	Pernyataan Visi dan Misi Statistik Ketahanan Sosial .....	18
Tabel 2.2	Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan Statistik Ketahanan Sosial .....	18
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024.....	20
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial.....	25
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan.....	42

# DAFTAR LAMPIRAN

---

Lampiran 1	Matriks Kinerja Dan Pendanaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024.....	49
Lampiran 2	Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024.....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. KONDISI UMUM
- 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN



## 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas data statistik Ketahanan Wilayah, Lingkungan Hidup, Politik dan Keamanan, serta Kerawanan Sosial. Data Statistik yang dihasilkan akan dipergunakan sebagai pendukung kegiatan teknis di bidang statistik ketahanan sosial melalui kerangka penjaminan kualitas. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang mengintegrasikan antara pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, pendanaan dengan kinerja serta pengukuran kinerjanya.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2020-

2024. Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial 2020-2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

## **1.2. Kondisi Umum**

### **1.2.1. Pencapaian Umum Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2017-2019**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial diberikan tugas, tanggung jawab dan peranan melaksanakan penyelenggaraan statistik Ketahanan Wilayah, Lingkungan Hidup, Politik dan Keamanan, serta Kerawanan Sosial, di lingkungan BPS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di bidang pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan di lingkungan BPS merupakan penegasan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya.

Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap kementerian/ lembaga agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif, guna mencegah pemborosan sumber daya.

Capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2017-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran selama periode Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2017-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2017 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Capaian Kinerja Statistik Ketahanan Sosial Terhadap Target Renstra, Menurut Sasaran/Tujuan dan Indikator Kinerja, 2017 - 2019**

Sasaran/Tujuan/ Indikator	Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja terhadap Renstra (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	3	1	3	3	1	3	100	100	100
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	13	12	13	13	12	13	100	100	100
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	9	11	11	9	11	11	100	100	100
Jumlah release data Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu.	8	4	3	8	4	3	100	100	100
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response</i> )	-	97 839	84 533	-	83 998	84 537	-	85,85	100

Sasaran/Tujuan/ Indikator	Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja terhadap Renstra (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<i>rate</i> ) survei Ketahanan Sosial									
Jumlah pengguna data statistik Ketahanan Sosial sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan Nasional	65	87	40	60	88	40	92,31	101,15	100
Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial metadatanya terdapat pada SiRusa	9	10	10	8	10	11	88,87	100	110

Pencapaian sasaran tersedianya data statistik ketahanan sosial yang berkualitas ditandai dengan indikator keberhasilan (*outcome*) berupa jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi, jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang terbit tepat waktu, jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang memiliki ISSN/ISBN, jumlah *release* data Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu, persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei Statistik Ketahanan Sosial, Jumlah pengguna data Statistik Ketahanan Sosial sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan Nasional, serta Jumlah aktivitas Statistik Sosial yang metadatanya terdapat pada SiRusa.

Pencapaian Sasaran Terlaksananya penyediaan data statistik bidang Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas dari tahun 2017-2019 dapat memenuhi target kinerja cukup baik rata-rata sebesar 100 persen, bahkan ada yang pencapaiannya lebih dari 100 persen, yaitu 101,15 persen tahun 2018. Walaupun masih ada beberapa indikator yang belum dapat memenuhi target kinerja (dibawah 100

persen), seperti jumlah pengguna data statistik Ketahanan Sosial sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan Nasional (92,31 persen) dan jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial yang metadatanya terdapat pada SiRusa (88,87 persen) tahun 2017. Sedang tahun 2018, indikator yang belum dapat memenuhi target kinerja (dibawah 100 persen) adalah persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei Ketahanan Sosial sebesar 85,85 persen.

Pada tahun 2019, realisasi indikator jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi sesuai target yang ditetapkan. Begitu pula untuk realisasi jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang terbit tepat waktu, jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang memiliki ISSN/ISBN, jumlah release data statistik ketahanan sosial yang tepat waktu, persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei Statistik Ketahanan Sosial dan jumlah pengguna data statistik Ketahanan Sosial sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan Nasional semuanya mencapai target 100%. Sedang realisasi jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial yang metadatanya terdapat pada SiRusa melebihi target yaitu 110 persen.

Dari pengukuran indikator-indikator ini ditetapkan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada periode tahun 2017-2019 dapat dikatakan berhasil. Bila dirinci menurut skala pengukuran kinerja maka dari Tabel 1 terlihat bahwa seluruh indikator dalam kategori berhasil, terkecuali satu indikator dalam kategori cukup berhasil yaitu persentase pemasukan dokumen (*respon rate*) survei Statistik Ketahanan Sosial.

### **1.2.2. Aspirasi Masyarakat**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berusaha memerhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami. Berdasarkan publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2019, diketahui bahwa ragam data yang paling banyak dicari konsumen BPS

Pusat adalah data statistik sosial. Selain itu, diketahui bahwa data yang berasal dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yaitu data tentang kemiskinan termasuk 5 data terbesar di bidang sosial yang dibutuhkan oleh pencari data. Ada sekitar 13,07 persen pencari data di bidang sosial yang mencari data kemiskinan.

### **1.2.3. Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2015-2019**

1. Forum konsultasi publik sebagai inovasi baru pengumpulan data dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015.

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem basis data mikro yang digunakan sebagai basis Program Perlindungan Sosial yang dibangun dari hasil pendataan 2011 oleh BPS. BDT tersebut kemudian dimuktahirkan kembali pada tahun 2015 menggunakan pendekatan strategis dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam suatu forum yang dinamakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Hasil dari FKP tersebut disahkan oleh Pemerintah Daerah (Camat a.n. Bupati/ Walikota). Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ini masuk 99 besar pada lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Reformasi dan Birokrasi pada tahun 2016.

2. *Updating Podes 2019*

- Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Data Podes yang *di-update* mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/ transportasi. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes 2019*), yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan Podes.
- Pendataan menggunakan CAPI, sehingga proses pengolahan data dilakukan sekaligus pada saat pendataan.

### 3. Perubahan Metode Penghitungan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan kemiskinan pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan mencakup periode 1976-1981. Pada dasarnya, metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu *basic needs approach* dimana kemiskinan dikonseptualisasi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar seperti sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan berkembangnya waktu, BPS senantiasa melakukan pemutakhiran terhadap metodologi penghitungan penduduk miskin yang salah satunya adalah terkait dengan penentuan Garis Kemiskinan. Hingga saat ini metodologi penghitungan kemiskinan didasarkan pada metode yang telah dikembangkan pada tahun 1998 (metode 1998). Sejalan dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat selama periode tahun 1998 hingga saat ini, maka dipandang perlu adanya pemutakhiran pada metode 1998 ini.

Pemutakhiran metode penghitungan kemiskinan didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Adanya perubahan pola konsumsi di masyarakat.
- b. Jenis paket komoditi dasar pada metode 1998 terutama makanan yang beberapa dipandang sudah tidak relevan lagi pada saat ini, dan menambahkan beberapa komoditi makanan baru yang saat ini banyak dikonsumsi.
- c. Munculnya komoditi baru yang dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat yang tidak/belum ada pada metode 1998.

- d. Adanya perubahan batas kalori minimum terbaru sebesar 2150 kilokalori yang ditetapkan pada hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012.
4. Kecepatan Rilis Data Kemiskinan

Sebelumnya rilis hasil penghitungan data kemiskinan dari hasil data Susenas dirilis di tahun berikutnya. Namun sekarang rilis hasil penghitungan kemiskinan dapat dilakukan di tahun yang sama.
5. Penghitungan Transient Kemiskinan

Penghitungan Transient kemiskinan sebelumnya hanya dilakukan dengan studi mendalam dengan cara wawancara, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggambarkan estimasi transient kemiskinan secara nasional. Namun sekarang ada perubahan dalam penghitungan transient kemiskinan yang sudah menggunakan metode penghitungan *panel syntetic*, sehingga sudah bisa dilakukan untuk estimasi transient kemiskinan secara nasional.
6. Perubahan Metode Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Adanya perubahan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang sebelumnya penghitungan IDI dilakukan dengan menggunakan indikator demokrasi politik dengan sumber data utama Koran. Namun sekarang penghitungan IDI dilakukan menggunakan indikator-indikator yang lebih komprehensif dengan menambahkan indikator demokrasi ekonomi. Sumber data diperluas, selain koran juga menggunakan dokumen instansi pemerintah dan LSM serta portal berita *online*.
7. Statistik Kebencanaan

Posisi Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Belum lagi posisi Indonesia yang juga terletak pada jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang

dikenal dengan *Pacific Ring of Fire*. Indonesia yang berada di negara yang rawan bencana mendesak BPS untuk turut serta menyediakan data terkait bencana. BPS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), konsultan bencana serta dibantu oleh UNFPA telah menyusun kerangka kerja Satu Data Bencana Indonesia (SDBI). Dengan tersedianya SDBI ini diharapkan akan terbentuk Statistik Kebencanaan (*Disaster Statistics*). Dengan Statistik ini diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga baik nasional maupun internasional dapat memahami dampak dan kerugian akibat bencana sehingga aksi penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

## **1.3. Potensi dan Permasalahan**

### **1.3.1 Potensi yang dimiliki**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sehari-harinya didukung oleh sejumlah 59 sumber daya manusia (SDM) yang sebagian besar yaitu 55,93 persen berpendidikan DIV/S1, sebesar 40,68 persen berpendidikan S2 dan sisanya 3,39 persen berpendidikan SMA. Dari data tersebut terlihat bahwa kualitas SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2019 tersebut cukup baik.

Indonesia merupakan anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs)*. Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukkan pada rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2020. SDG's menjadi pendorong bagi penyelenggara statistik untuk lebih meningkatkan peran serta dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menentukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian

Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*). Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's.

### 1.3.2 Permasalahan yang Dihadapi

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020–2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (tantangan). Berbagai tantangan yang muncul pada berbagai tahap kegiatan Statistik Ketahanan Sosial yang dilaksanakan harus dapat diatasi guna mewujudkan data berkualitas.

Kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data bidang statistik ketahanan sosial yang dihasilkan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan indikator sektoral yang berakibat pada beban muatan variabel suatu survei. Oleh karena itu perlu ditingkatkan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Meningkatnya beban muatan survei menyebabkan meningkatnya *respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Hal ini dapat menjadi kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat survei yang dilakukan bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Di sinilah diperlukan kegiatan sosialisasi, koordinasi yang terus menerus

sebagai upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun non rumah tangga non usaha agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data serta informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan atau berpengaruh terhadap ketepatan waktu rilis (*timeliness*).



# BAB II

## VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

- 2.1. VISI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
- 2.2. MISI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
- 2.3. TUJUAN DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
- 2.4. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL



## 2.1. Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Visi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah **“Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”** untuk mendukung visi dari Deputi Bidang Statistik Sosial yaitu **“Penyedia Data Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju”**

Rumusan visi tersebut berarti bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berperan dalam penyediaan data statistik ketahanan sosial, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung visi dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

Perlu juga digarisbawahi pencapaian visi membutuhkan adanya komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

## 2.2. Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Untuk mencapai visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, maka ditetapkan misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik ketahanan sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik ketahanan sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

**Tabel 2.1 Pernyataan Visi dan Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

<b>Visi Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024</b>	Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju	<b>Misi Statistik Ketahanan Sosial</b>
		Misi 1: Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial Berkualitas yang Berstandar Nasional dan Internasional
		Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik Ketahanan Sosial Untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

### 2.3. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Tujuan yang ditetapkan oleh Statistik Ketahanan Sosial mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga mendukung upaya pencapaian visi dan misi Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

<b>Visi Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024</b>	Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk Indonesia Maju	<b>Misi Statistik Ketahanan Sosial</b>
		Misi 1: Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial Berkualitas yang Berstandar Nasional dan Internasional
		Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Prima di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional
<b>Tujuan</b>	1. Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
	2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang Statistik Ketahanan Sosial	

1. Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Misi ke-1: Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

2. Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang Statistik Ketahanan Sosial.

Misi ke-2: Mewujudkan pelayanan prima di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

**Tujuan pertama**, merupakan pembangunan statistik ketahanan sosial menuntut Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk meningkatkan kualitas data statistik ketahanan sosial dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

**Tujuan kedua**, fungsi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan ketiga ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

## **2.4. Sasaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, maka kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024 dipenuhi dengan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Adapun tujuan, sasaran strategis, dirumuskan dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial  
2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis
Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang Statistik Ketahanan Sosial	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Ketahanan Sosial

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pertama, yaitu menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Sasaran Strategis 2: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Ketahanan Sosial. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan yang kedua, yaitu meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Ketahanan Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL
- 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
- 3.3. KERANGKA REGULASI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL



### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial**

Arah dan kebijakan strategi Deputi Bidang Statistik Sosial dalam penyediaan data dan informasi statistik merupakan turunan dari arah dan kebijakan strategi BPS yang termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024.

#### **3.1.1. Arah dan kebijakan Strategi**

Arah dan kebijakan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial berfokus pada 3 (tiga) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh BPS yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik Sosial untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik sosial
- b. Pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna
- c. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial
- b. Memastikan kemitakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus
- d. Mengembangkan penerapan SAE dalam penyediaan data statistik sosial
- e. Menerapkan Big Data dalam penyediaan data statistik sosial
- f. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui NQAF
- g. Memastikan penggunaan standard dan metodologi data statistik sosial di Indonesia
- h. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat internasional

- i. Menugaskan statistisi dalam pelaksanaan kegiatan survei/sensus
2. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Penguatan implementasi SSN
- b. Penyediaan statistik sektoral

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik
- b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I
- c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam mengasilkan statistik sosial. Saat ini sudah banyak K/L/D/I yang mendapatkan asistensi dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Deputi Bidang Statistik Sosial

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
T1. Menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Tersedianya data statistik sosial yang berkualitas	AK.1. Peningkatan kualitas data statistik sosial	1. Meningkatnya akurasi data 2. Memastikan kemutakhiran data 3. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi 4. Mengembangkan penerapan Small Area Estimation (SAE) dalam penyediaan data statistik sosial 5. Menerapkan Big Data dalam analisis pendataan	PPIS	Penyediaan dan Pengembangan data: 1. Statistik Demografi 2. Statistik Ketenagakerjaan 3. Statistik Upah dan Pendapatan 4. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 5. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 6. Statistik Rumah Tangga 7. Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial 8. Statistik Kesehatan dan Perumahan 9. Statistik Ketahanan Wilayah 10. Statistik Lingkungan Hidup 11. Statistik Politik dan Keamanan 12. Statistik Kerawanan Sosial
		AK.2. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	6. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui NQAF 7. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional 8. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat Internasional 9. Menugaskan Statistisi dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk		

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
T2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	SS.2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	AK.3. Penguatan implementasi SSN  AK.4. Penyediaan statistik sektoral	10. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik 11. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I 12. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial 13. Menugaskan Statistisi untuk memperkuat statistik sektoral 14. Memaksimalkan peran Kedeputian Sosial untuk Satu Data Indonesia (SDI)		

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024, Deputi Bidang Statistik Sosial mendukung arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan (*mainstreaming*). Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020 – 2024 antara lain:

a. Data Perencanaan Pembangunan

Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah menghasilkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, diantaranya data-data strategis dan tujuan pembangunan.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Deputi Bidang Statistik Sosial berkomitmen dalam pelaksanaan target TPB dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap indikator statistik sosial. Selain sebagai penyedia data, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam mengawal K/L lain dalam penyediaan indikator TPB

c. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender lama pembangunan statistik sosial. Strategi yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial antara lain:

- I. Menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan
- II. Memasukan perspektif gender dalam survei yang dilakukan
- III. Memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
- IV. Memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke kuliah/sekolah, kursus, dan pelatihan

d. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Salah satu survei di Bidang Statistik Sosial terkait modal sosial budaya yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan merujuk pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2009 dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

e. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Aspek pemanfaatan teknologi komputasi dilakukan dalam kegiatan statistik seperti *big data* dan *mobile computing*.

f. Statistik Modal Sosial dan Kebahagiaan

Selain menghasilkan indikator Statistik Obyektif, Kedeputan bidang Statistik Sosial juga menghasilkan statistik subyektif yang menjadi pelengkap dari statistik lainnya.

### 3.1.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijalankan di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang mencakup pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas

dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi beberapa komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon II (direktorat) di lingkungan Kedepatian Bidang Statistik Sosial dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kegiatan di Kedepatian Bidang Statistik Sosial yang sesuai dengan Program Penyediaan dan Pelayanan Statistik (PPIS) antara lain:

1. Penyediaan dan pengembangan data di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
2. Penyediaan dan pengembangan data di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Penyediaan dan pengembangan data di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

### **3.1.3. Prioritas Nasional**

Terdapat 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional (PN) periode tahun 2020 – 2024. Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki kegiatan penyediaan data statistik yang mendukung PN diantaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)  
Pelaksanaan SP2020 mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN yang berkaitan dengan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.
2. Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)  
Pelaksanaan Sakernas mendukung PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.

### 3. Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pelaksanaan Susenas mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

### 4. Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pelaksanaan Pendataan Podes mendukung PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah.

### 5. Penyusunan Statistik Keamanan

Pelaksanaan penyusunan statistik keamanan mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

### 6. Survei Prilaku Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

### 7. Survei Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

## **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

### **3.2.1. Arah dan Kebijakan Strategi**

Arah dan kebijakan Strategi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berfokus pada 2 (dua) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial yaitu:

#### 1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan yaitu meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik ketahanan sosial
- b. Penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial
  - b. Memastikan kemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data, penerapan metodologi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta penggunaan *Big Data* untuk mendukung data **statistik resmi yang dihasilkan**
  - c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai kaidah dan standard international
  - d. Memastikan penggunaan standard dan metodologi data statistik sosial di Indonesia
2. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Ketahanan Sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan implementasi SSN
2. Penyediaan statistik sektoral

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik
2. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I
3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial

### 3.2.2. Program dan Kegiatan

Kegiatan yang dijalankan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam PPIS adalah Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik.

### 3.2.3. Prioritas Nasional

Prioritas Nasional merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan 9 (Sembilan) agenda prioritas pemerintah (Nawacita) ke dalam bentuk kegiatan prioritas nasional. Ada 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024. Ada 4 kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, yaitu:

1. Kemiskinan

Di dalam dokumen RKP (Rapat Kerja Pemerintah) 2020 sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 salah satunya adalah “Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan”. Indikator kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu indikator strategis BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.

2. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*)

Pendataan Podes (*Updating Podes*) dilaksanakan setiap tahun pada saat tidak dilaksanakan Podes besar. Podes besar dilaksanakan pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Pendataan Podes, baik *Updating Podes* maupun Podes Besar, bermanfaat untuk menyediakan data sampai level wilayah terkecil yaitu desa. Data yang dicakup adalah keberadaan, ketersediaan, dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan. Data tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah. Selain itu Hasil Pendataan Podes, juga menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) serta Indeks Desa (ID). IKG dipergunakan sebagai salah satu variabel pengalokasian Dana Desa. Sedangkan ID dipergunakan untuk melihat perkembangan pembangunan desa.

3. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan public.

4. Survei Demokrasi Indonesia.

Survei ini menghasilkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang dipergunakan untuk melihat perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.

### **3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional.

Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu direktorat teknis dalam lingkup satuan organisasi BPS, secara umum regulasi yang mengatur kegiatan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah sama dengan regulasi yang mengatur kegiatan di BPS yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial khusus terkait hal yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan statistik :

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus,
- Mengatur entitas yang data dasar, sektoral, dan khusus. Melakukan penyelenggaraan statistik

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan sektoral, dan khusus, teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar,
- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
- Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
- Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Intisari dari regulasi:

- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral

d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

e. Pepres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI)

Perpres tersebut menerangkan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi.

Meskipun telah ada regulasi sebagai payung hukum sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan statistik terutama penyediaan data statistik sosial, masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Masih terdapat responden yang tidak bersedia diwawancarai dalam kegiatan survei.
- b. Masih terdapat pengumpulan data sektoral yang dilakukan oleh BPS, yang seharusnya dapat dilakukan oleh K/L/D/I.
- c. Masih terdapat hasil statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang belum diserahkan kepada BPS.
- d. Masih terdapat hasil statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya.



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

4.1. TARGET KINERJA DIREKTORAT STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL

4.2. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT STATISTIK  
KETAHANAN SOSIAL



## **4.1 Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020–2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>T1: Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>						
	<b>SS1: Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas</b>						
	Persentase publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses oleh konsumen	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Indikator Statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Indikator Statistik Ketahanan Sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100	100	100	100	100
2	<b>T2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang Statistik Ketahanan Sosial</b>						
	<b>SS2: Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Ketahanan Sosial</b>						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen		100	74	96	100
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen			100	100	100

#### **4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial akan menjalankan 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan dan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas,** dengan indikator:
  - Persentase publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen.
  - Persentase Indikator Statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN.
  - Persentase Indikator Statistik Ketahanan Sosial yang dapat dipergunakan sebagai indikator SDGs.
- 2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Ketahanan Sosial,** dengan indikator:
  - Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
  - Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan.

Sedangkan kegiatan yang dijalankan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada 2020-2024 akan menghasilkan 3 (tiga) output sebagai berikut:

- (a) 2907.006 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial
- (b) 2907.008 publikasi/laporan pendataan podes
- (c) 2907.100 laporan pembinaan statistik sektoral

#### **4.2. Kerangka Pendanaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Proses pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang tertuang dalam Dokumen Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan**

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)	35.957	164.177	64.536	41.446	182.690
I Menyediakan data statistik bidang Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	35.957	164.127	64.484	41.392	182.635
II Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I		50	52	54	55
<b>Total</b>	<b>35.957</b>	<b>164.177</b>	<b>64.536</b>	<b>41.446</b>	<b>182.690</b>



# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. PENUTUP



## 5.1 Penutup

Rencana Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial periode 2020–2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan BPS dalam mengisi pembangunan nasional RPJMN 2020–2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di Statistik Ketahanan Sosial.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh staf Direktorat Statistik Ketahanan Sosial maupun jajaran yang terkait di BPS daerah. Dengan dilandasi oleh semangat dan budaya kerja yang tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS yakni profesional, berintegritas dan amanah kiranya keinginan kuat untuk menyediakan data statistik Sosial yang berkualitas dapat selalui terwujud dan akan memberikan dampak serta dukungan kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode 2020-2024.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya demi terwujudnya capaian kegiatan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan melalui Renstra ini.





LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) / Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> ) / Indikator	Target					Alokasi (dIm Juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)</b>							36.956,8	164.177,3	64.535,7	41.445,5	182.690,1	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
	<b>Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas</b>						35.956,8	164.127,3	64.483,9	41.392,0	182.634,7	
	Persentase publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen	100	100	100	100	100						
	Persentase Indikator Statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	100	100	100	100	100						
	Persentase Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	100	100	100	100	100						
	<b>Penguatan statistik Sektoral K/L/D/I di</b>						50,0	51,8	53,6	55,4	50,0	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) / Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> ) / Indikator	Target					Alokasi (dIm Juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>bidang Statistik Ketahanan Sosial</b>											
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial		100	74	96	100						
	Persentase aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan			100	100	100						

Lampiran 2. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2020-2024

Kegiatan/Komponen/Sub Komponen		Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2907</b>	<b>Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)</b>	35.956.753	164.177.270	64.535.658	41.445.529	182.690.119
	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	7.327.526	8.723.585	35.079.589	10.457.763	10.938.816
	PUBLIKASI PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO	1.216.379	1.467.607	1.510.307	1.553.269	1.596.501
	PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES	27.412.848	153.936.078	27.894.012	29.380.936	170.099.366
	LAPORAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	-	50.000	51.750	53.561	55.436





***BADAN PUSAT STATISTIK***

Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta, 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)